

Bersama Kementrian, Pemkab. Rohil Ikuti Diskusi DBH Migas di Batam, ini Hasilnya



RIAUEXPRESS, ROHIL- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Drs Surya Arfan, Msi menghadiri acara Focus Group Diskusi EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Indonesia di Hotel Aston kota Batam, Senin (09/04/18) pekan lalu.

Menurut Sekda, bahwa acara tersebut mengambil tema "Peran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait. Transparansi Dana Bagi Hasil Industri Ekstraktif.

"Sebagai nara sumber pada acara tersebut dari kemenkeu, ESDM, Publish What You Pay. Dan bahkan Setda Provinsi Riau H. Ahmad Hijazi, SE., MSI, juga diberi kesempatan sebagai nara sumber, "ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/04/18).

Dijelaskan, dalam Focus Group Diskusi (FGD) tersebut, pada intinya menjelaskan mekanisme/tata cara penghitungan produksi/lifting Migas, DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.

"Dalam diskusi kemarin, berkembang usul dan saran para peserta agar dilakukan rekonsiliasi penghitungan DBH Migas. Setda provinsi Riau H. Ahmad Hijazi, SE., MSI menyampaikan beberapa tentang masalah DBH Migas, baik usul penghitungan bersama penyaluran DBH tepat waktu, "ujjar Sekda.

Sebagai salah satu daerah penghasil Migas, Surya Arfan terangkan, dari peserta meminta, jika terjadi penurunan harga lifting, hendaknya jangan disamakan pembagiannya dengan daerah non penghasil.

Selain itu juga, sambungnya, khususnya Kabupaten Rohil meminta agar terkait DBH menghitung ulang, yang katanya ada kelebihan transfer tersebut, sehingga Rohil harus mengembalikan dana itu.

?Kita minta dihitung ulang DBH Migas 2013-2017, karena ada selisih hitungan antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat, yaitu sekitar 2 triliun lebih, "pungkasnya.

Sebagai informasi, Apa yang menjadi harapan pemerintah provinsi Riau sedang di bahas oleh Tim Kementerian terdiri kemenkeu, ESDM, Kemendagri, dan SKK migas.**

Penulis: Suprianto